



## PANCASILA DAN GOOD GOVERNANCE: STRATEGI MEMPERKUAT AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM KONTEKS POLITIK IDENTITAS

Adinda Eka Rahayu<sup>1</sup>, Mohammad Afrizal Rizky Setyawan<sup>2</sup>, Sulthonika Mahfudz Al Mujahidin<sup>3</sup>, M. Asif Nur Fauzi<sup>4</sup>.

<sup>123</sup>Program Studi Teknolog Informasi Fakultas Informatika  
[sulthon02032019@gmail.com](mailto:sulthon02032019@gmail.com)

### Abstrak

Narasi politik identitas yang mengemuka menjelang Pemilu 2024 mengancam persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Penelitian ini mengupas bagaimana Pancasila dapat mereaktualisasikan semangat persatuan dalam menghadapi pusaran politik identitas tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian mengeksplorasi peran Pancasila sebagai perekat keberagaman dalam memperkuat akuntabilitas publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Temuan mengungkap bahwa politik identitas mengancam stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila seperti transparansi, partisipasi, dan penegakan hukum tanpa diskriminasi. Pancasila harus dijadikan landasan moral untuk tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas dalam merajut kebhinekaan bangsa. Penelitian ini merekomendasikan revitalisasi pemahaman Pancasila dan integrasi prinsip good governance dalam kebijakan pemerintah. Diharapkan dapat memandu Indonesia menapaki kemajuan bermartabat dengan bersatu menghadapi tantangan global. Apakah Anda tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Indonesia dapat mengejawantahkan semangat Bhinneka Tunggal Ika di tengah pusaran politik identitas?

**Kata Kunci:** Pancasila, Akuntabilitas Publik, Politik Identitas, Tata Kelola Pemerintahan

### Abstract

The narratives of identity politics emerging ahead of the 2024 Elections threaten the unity of Indonesia's pluralistic nation. This research explores how Pancasila can

reinvigorate the spirit of unity in the face of this unsettling vortex of identity politics. Employing a qualitative approach, the study investigates Pancasila's role as the unifying thread of diversity in

bolstering public accountability and good governance. The findings reveal that identity politics jeopardize social stability and public trust in the government. Therefore, strategic steps are needed to implement Pancasila's values, such as transparency, participation, and non-discriminatory law enforcement. Pancasila must serve as the moral foundation for clean, effective, and integrity-based governance in weaving the nation's diversity. This research recommends revitalizing the understanding of Pancasila and integrating good governance principles into government policies. It is expected to guide Indonesia towards dignified progress by uniting to face global challenges. Are you interested in learning more about how Indonesia can embody the spirit of *Bhinneka Tunggal Ika* amidst the swirling currents of identity politics?

**Keywords:** *Pancasila, Public Accountability, Identity Politics, Governance, National Unity*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia, sebagai negara yang megah dengan lebih dari 17.000 pulau, adalah sebuah simbol persatuan dalam keberagaman. Bangsa ini secara unik terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama, yang mencerminkan kekayaan multikultural yang menjadi ciri

khasnya tersendiri. Sejak awal, Indonesia telah menghadapi tantangan yang begitu besar untuk menyatukan keragaman didalam satu bingkai negara. Perjalanan panjang menuju kemerdekaan melibatkan tidak hanya aksi heroik, tetapi juga kisah pengorbanan besar dari para pejuang yang berjuang melawan penjajahan untuk mencapai kebebasan. Hingga pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan penuh kesungguhan, bangsa Indonesia mengumumkan kemerdekaannya. Tetapi, perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya berakhir dengan pembebasan dari penjajah, melainkan justru dimulai pada saat tersebut. Para "*The Founding Father*" atau bapak pendiri kita, ketika merancang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, membahas fondasi-fondasi negara yang akan dibangun (Yani & Dewi, 2021). Banyak perdebatan dan perjuangan pemikiran memainkan peran kunci dalam menentukan visi negara yang baru merdeka. Setelah melalui masa-masa perdebatan sengit dan pertukaran opini yang memanas, pada tanggal 1 Juni 1945, dimulailah kelahiran sebuah landasan negara yang disebut Pancasila. Pancasila

lahir sebagai kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang bersifat universal (Putri & Adam, 2022). Kelima sila dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan, menjadi perekat dan pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara yang beradab dan bermartabat.

Pancasila, sebagai ideologi dan falsafah dasar negara, menjadi pondasi utama dalam memandu Indonesia menuju arah yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa (Noersyaheri dkk., 2022). Sebagai negara yang mempunyai bermacam keragaman, Indonesia membutuhkan pemersatu yang kokoh yaitu sebuah ideologi yang menawarkan landasan filosofis untuk membangun karakter dan jati diri bangsa. Namun, mewujudkan nilai-nilai Pancasila tidak cukup dengan sekadar wacana. Untuk mencapai cita-cita luhur bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan prinsip-prinsip itu sendiri seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum menjadi tuntutan agar setiap

kebijakan pemerintah mampu memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan rakyat (Nurhidayat, 2023). Hal ini menekankan urgensi menjadikan Pancasila tidak hanya sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai panduan dalam menjalankan roda pemerintahan yang berintegritas, bersih, efektif, dan mengutamakan pelayanan kepada rakyat.

Sayangnya, wacana tentang mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia kembali mendapat ujian berat pada tahun 2024 ini. Mengupas realita politik identitas yang mengemuka menjelang Pemilu Nasional menjadi penting untuk dikaji. Betapa tidak, tahun politik ini diwarnai oleh narasi-narasi yang sarat muatan primordial, baik berbasis suku, ras, agama, maupun golongan, yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memperkuat sentimen identitas demi meraih keunggulan politik yang strategis (Wingarta dkk., 2021). Dinamika politik identitas yang intensif telah menyebabkan keretakan sosial yang signifikan di tengah masyarakat Indonesia. Keprihatinan

mendalam muncul seiring dengan pengamatan bahwa koherensi nasional, yang merupakan fondasi dari persatuan dan kesatuan bangsa, mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Lebih lanjut, meningkatnya polarisasi identitas yang tidak terkendali dapat berubah menjadi tindakan radikal dan sikap sektarian, yang mengancam tidak hanya kelompok-kelompok tertentu tetapi juga kesatuan sosial secara keseluruhan. Tanpa intervensi yang tepat dan responsif, fenomena ini dapat memicu krisis yang mengancam stabilitas nasional dan menggoyahkan pilar-pilar demokrasi yang telah dibangun. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan politik identitas serta strategi untuk memperkuat akuntabilitas publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila di tengah kompleksitas isu ini. Harapan dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Harapan ini merupakan landasan yang kuat untuk

merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengatasi tantangan politik identitas yang meresahkan, yang secara nyata mengancam cita-cita memiliki pemerintahan yang bersih dan melayani seluruh rakyat.

Tentunya, kekhawatiran kita sangat beralasan. Namun, kita tidak boleh hanya terpaku pada kekhawatiran tanpa mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi masalah ini. Pertanyaan krusialnya adalah bagaimana kita dapat menghadapi fenomena politik identitas yang mengancam cita-cita untuk memiliki pemerintahan yang bersih dan melayani seluruh rakyat? Apakah kita akan membiarkan politik pragmatis merusak semangat persatuan dan nilai-nilai luhur Pancasila yang telah menjadi perekat keberagaman bangsa?.

Pemilihan Presiden Indonesia ke-13, yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024, menjadi sorotan utama karena terbuka bagi kandidat baru akibat batasan masa jabatan presiden hingga dua periode. Dalam persaingan menuju kursi kepresidenan, politik identitas semakin memengaruhi dinamika politik Indonesia. Kandidat-kandidat

menonjol seperti Prabowo Subianto dari Partai Gerindra dan Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, memiliki popularitas tinggi, yang mencerminkan adopsi yang semakin kuat terhadap politik identitas di Indonesia. Politik identitas ini mencakup pengembangan dan penyesuaian agenda politik kepada mereka dengan karakteristik sosial identitas serupa. Prabowo, kontroversial di kalangan moderat, kerap memobilisasi sentimen nasionalistik dan religius yang radikal, sedangkan Anies Baswedan juga pernah menyuarakan sentimen berbasis etnis. Dampaknya telah terasa di masyarakat, dengan ekstremisme merajalela dan alienasi terhadap minoritas. Di tengah narasi-narasi primordial yang mengalir deras menjelang Pemilu, penting bagi Indonesia untuk menemukan solusi yang memperkuat semangat persatuan dan nilai-nilai Pancasila sebagai perekat keberagaman bangsa, sambil menghadapi tantangan politik identitas yang meresahkan. Pentingnya menghadapi tantangan politik identitas ini tergambar dari dampak negatifnya yang dapat memupuk pandangan sempit,

stereotip negatif, dan bahkan memicu aksi-aksi radikalisme yang mengancam kelompok lain. Potensi disintegrasi bangsa yang mengkhawatirkan ini sungguh nyata. Kita tidak ingin mengalami krisis stabilitas nasional berskala besar hanya karena terjebak dalam pusaran primordialisme sempit. Pemerintahan yang reformis dalam memberikan pelayanan publik pun akan semakin terhambat jika terkungkung oleh bias identitas.

Gejala-gejala di atas, yang terjadi dalam tengah gencarnya narasi politik identitas yang merusak persatuan bangsa, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan penting, seperti pertanyaan krusial yang sering dipertanyakan: 1) Bagaimana kita dapat memperkuat akuntabilitas publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tengah meningkatnya ancaman politik identitas terhadap cita-cita Pancasila? dan 2) Strategi apa yang dapat dilakukan untuk mereaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di

tengah arus globalisasi dan dinamika politik identitas yang semakin kompleks?

## **METODE**

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan karakteristik deskriptif, yang dikelola oleh tim peneliti yang terdiri dari tiga individu yang berpengalaman. Pilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan akan analisis mendalam terhadap teori dan data yang berasal dari sumber-sumber tertulis. Pendekatan kualitatif ini difokuskan pada analisis deskriptif yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti, tanpa melibatkan perhitungan angka. Sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, tim peneliti memiliki tanggung jawab untuk menetapkan fokus penelitian, menganalisis teori, dan menyusun kesimpulan berdasarkan data yang terkumpul. Sumber data utama diperoleh melalui studi pustaka, sebuah model penelitian yang mengandalkan informasi tertulis seperti buku, artikel jurnal, berita online, dan sumber-sumber lain yang relevan. Proses penelitian melibatkan

pengumpulan dan analisis referensi teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan strategi memperkuat akuntabilitas publik dan good governance dalam konteks politik identitas di Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam, diinterpretasikan, dan disintesis untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan serta rekomendasi strategi yang dapat diterapkan. Metode ini memberikan wawasan yang mendalam tentang topik yang dikaji, dengan fokus pada pemahaman teoritis dan implikasi praktisnya dalam konteks politik identitas Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Politik Identitas di Indonesia: Fenomena, Bentuk, dan Dampaknya**

Di tahun 2024, fenomena politik identitas di Indonesia mencapai titik kritis menjelang pemilihan umum. Indonesia, sebagai negara dengan keragaman sosial, kini dihadapkan pada situasi yang penuh tantangan, di mana politik identitas memainkan peran dominan dalam peta politik (Desiree, 2022). Salah satu contoh yang mencolok dari

fenomena ini adalah kandidasi Prabowo Subianto untuk posisi presiden. Sebagai tokoh yang mewakili Partai Gerindra, Prabowo telah berhasil memobilisasi sentimen nasionalis dan agama yang radikal dalam upayanya meraih dukungan. Kampanye-kampanye politiknya kerap kali mengandung unsur-unsur intoleransi agama dan rasial, serta memperingatkan tentang pengaruh asing yang dianggap mengancam nilai-nilai nasional Indonesia. Di sisi lain, Anies Baswedan, seorang politisi independen yang menjabat sebagai Gubernur Jakarta, juga menarik perhatian publik dengan popularitas yang signifikan. Meskipun memiliki pendekatan yang lebih moderat daripada Prabowo, Anies Baswedan juga terlibat dalam adopsi politik identitas dalam kampanye politiknya. Dalam suasana politik yang semakin tegang menjelang pemilihan umum, kedua tokoh ini mencerminkan arus politik identitas yang semakin kuat dan kompleks di Indonesia. Kampanye Prabowo yang menekankan sentimen nasionalis dan agama yang radikal, serta peringatannya terhadap pengaruh asing, mencerminkan salah

satu aspek politik identitas yang sedang berkembang di Indonesia. Di sisi lain, popularitas Anies Baswedan sebagai politisi independen menunjukkan adopsi politik identitas yang lebih moderat tetapi tetap signifikan dalam menarik perhatian masyarakat. Dalam konteks ini, fenomena politik identitas di Indonesia menjadi sorotan utama karena berpotensi mempengaruhi arah politik dan sosial negara. Kehadiran kandidat-kandidat seperti Prabowo dan Anies Baswedan, yang mampu memikat perhatian publik dengan narasi politik identitasnya, mencerminkan kompleksitas dinamika politik saat ini. Hal ini menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan stabilitas sosial dan politik di negara yang kaya akan keberagaman seperti Indonesia.

Fenomena politik identitas di Indonesia tidak terbatas pada satu dimensi saja, melainkan muncul dalam beragam bentuk yang memanfaatkan sentimen primordial masyarakat. Seperti yang tercermin dari contoh Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, politik identitas dapat mengambil bentuk

nasionalisme radikal, intoleransi agama, kecurigaan terhadap pengaruh asing, hingga sentimen etnis tertentu. Ini sejalan dengan konsep politik identitas, di mana kelompok-kelompok tertentu mengembangkan dan menyesuaikan agenda politik mereka untuk menarik simpati dari mereka yang memiliki karakteristik sosial-identitas yang serupa. Dalam konteks Indonesia, politik identitas sering memanfaatkan isu-isu sensitif seperti nasionalisme, agama, suku, dan ras sebagai alat untuk memobilisasi dukungan publik. Sebagai contoh, fenomena politik identitas yang terjadi di Indonesia mencerminkan bagaimana isu-isu ini digunakan untuk memperkuat narasi politik dan mendapatkan dukungan massa (Febriansyah dkk., 2024).

Merebaknya politik identitas di Indonesia membawa dampak negatif yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu dampak yang paling mengkhawatirkan adalah polarisasi masyarakat berdasarkan identitas sempit, yang dapat memicu sikap sektarian, stereotip negatif, dan bahkan tindakan radikal terhadap kelompok lain (Permatasari, 2021).

Hal ini bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang menjunjung tinggi keberagaman dalam kesatuan. Lebih jauh lagi, politik identitas dapat mengikis rasa kebangsaan dan memperkuat sentimen kedaerahan atau primordialisme yang sempit, sehingga mengancam kohesi nasional (BBC News Indonesia, 2024). Dampak lain yang tak kalah penting adalah mudurnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara, yang pada gilirannya dapat mengganggu akuntabilitas publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (Ridho & Putra, 2024).

Politik identitas di Indonesia, sebagaimana diuraikan oleh (Mas'udi, 2023), menyoroti bagaimana praktik demokrasi saat ini sering kali didominasi oleh kepentingan dan ambisi elit politik. Hal ini berpotensi mengabaikan kepentingan umum dalam proses pembuatan kebijakan, yang pada akhirnya dapat melemahkan praktik kebijakan demokratis dalam pengelolaan urusan publik dan fungsi pemerintahan. Dalam konteks Pemilihan Umum 2024, penggunaan

politik identitas dapat memperburuk kualitas demokrasi yang dalam beberapa analisis kontemporer dilihat sebagai mengalami stagnasi dan penurunan. Strategi elektoral semacam ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pemilihan, tetapi juga dapat menyebabkan polarisasi politik di level masyarakat yang berpotensi menciptakan konflik sosial dan eksklusi (Afrimadona, 2021). Fenomena ini sejalan dengan ancaman utama politik identitas yang terletak pada potensinya dalam memecah belah persatuan bangsa dan menggoyahkan stabilitas sosial jika tidak dikelola dengan bijak (., 2023), Semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjunjung keberagaman justru terkikis oleh politik identitas yang cenderung eksklusif dan memperkuat sentimen kedaerahan sempit, bertentangan dengan gagasan multikulturalisme (Priskila Shendy Hartanti & Dwi Ardhanariswari Sundrijo, 2022), khususnya di sila ketiga "Persatuan Indonesia", menekankan pentingnya persatuan melampaui perbedaan identitas demi mewujudkan kohesi nasional. Oleh karena itu, politik identitas harus disikapi secara kritis untuk mencegah

dampak negatifnya yang mengancam keutuhan NKRI.

Politik identitas bukanlah fenomena terisolasi semata di Indonesia. Sejalan dengan paragraf-paragraf sebelumnya yang menguraikan ancaman politik identitas terhadap persatuan dan stabilitas bangsa, fenomena ini juga merupakan tantangan global yang dihadapi banyak negara. Di Amerika Politik identitas merupakan fenomena kompleks yang berkembang sejak gerakan hak-hak sipil pada 1960-an (Aprea, 2021). Awalnya, politik identitas dimaksudkan untuk memperjuangkan inklusi dan kesetaraan bagi kelompok-kelompok terpinggirkan seperti Afrika-Amerika, wanita, dan komunitas LGBT. Namun, seiring waktu berjalan, fokus politik identitas telah bergeser dari inklusi menjadi pembagian. Terutama selama pemilihan presiden tahun 2016, isu identitas menjadi sangat sentral dan memicu perpecahan di antara kelompok-kelompok yang berbeda, yang memperdalam jurang sosial antara ras, etnis, agama, jenis kelamin, dan orientasi seksual (Amy Chua, 2018). Dampaknya terlihat

dalam tingginya tingkat ketegangan sosial, dengan setiap kelompok merasa terancam atau didiskriminasi, mendorong mereka untuk menjadi lebih defensif dan tertutup. Survei menunjukkan bahwa lebih dari setengah warga kulit putih Amerika percaya bahwa mereka sekarang menjadi ‘korban diskriminasi utama’, sementara kejahatan kebencian meningkat pasca pemilihan 2016. Peristiwa sejarah seperti gerakan hak-hak sipil dan perjuangan untuk hak-hak LGBT telah membentuk politik identitas di AS, sementara peristiwa kontemporer seperti unjuk rasa supremasi kulit putih di Universitas Virginia tahun 2017 menyoroti pengaruh politik identitas dalam diskursus politik dan kebijakan (Bui, 2024). Secara keseluruhan, politik identitas telah menjadi faktor sentral dalam dinamika sosial Amerika Serikat, memengaruhi pandangan politik, perilaku masyarakat, dan arah kebijakan pemerintah, dan pemahaman mendalam tentang politik identitas sangat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat Amerika saat ini.

Fenomena global politik identitas ini menunjukkan bahwa tantangan dalam menjaga persatuan dan stabilitas bangsa tidak hanya dihadapi Indonesia semata. Sebagai negara yang menjunjung tinggi keberagaman dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita memiliki tanggung jawab besar untuk meredam politik identitas dan memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai perekat kebhinekaan. Marilah kita mengambil hikmah dari sejarah perjuangan para pendahulu dalam merawat kebhinekaan, serta belajar dari pengalaman negara-negara lain dalam mengatasi politik identitas. Dengan menjunjung semangat persatuan, kita dapat menghalau ancaman perpecahan dan membangun Indonesia yang kuat, maju, dan bersatu di tengah kompleksitas global.

Seiring dengan dinamika politik yang semakin kompleks di Indonesia, tantangan terkait politik identitas memberikan dampak yang signifikan terhadap kohesi sosial dan akuntabilitas publik. Perlu dipahami bahwa politik identitas tidak hanya berdampak pada fragmentasi masyarakat berdasarkan garis-garis

identitas yang sempit, namun juga mengancam integritas sosial secara lebih luas. Terlebih lagi, kebijakan pemerintah yang cenderung dipengaruhi oleh pertimbangan identitas daripada kepentingan nasional dapat mengganggu akuntabilitas publik dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks yang lebih luas, politik identitas juga memiliki potensi untuk memicu radikalisme dan ekstremisme. Kelompok-kelompok yang merasa terancam atau didiskriminasi berdasarkan identitas dapat menjadi rentan terhadap narasi-narasi radikal yang mengancam stabilitas nasional dan kehidupan berdampingan secara damai di Indonesia (El Shidqi & Andriyani, 2022). Tantangan ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian utama bagi banyak negara lain di dunia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi keberagaman dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk meredam politik identitas dan memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai perekat kebhinekaan. Dengan belajar dari

sejarah perjuangan dan pengalaman negara-negara lain, serta menjunjung semangat persatuan, Indonesia dapat menghadapi ancaman politik identitas, membangun kohesi sosial yang kuat, dan menjadi negara yang maju serta bersatu di tengah kompleksitas global.

#### **B. Peran Pancasila dalam memperkuat persatuan dan meredam politik identitas**

Pembangunan negara dan politik adalah pandangan-pandangan tentang kepercayaan dan moral dapat memainkan peran penting yang sangat signifikan. Contohnya seperti yang pernah diucapkan Bung Karno pada HUT Proklamasi 1963, *A Nation Without Faith Cannot Stand*. Sang Proklamator dengan tegas melakukan bahwa suatu negara harus memiliki kekuatan karakter yang dibangun berdasarkan kedalaman penghayatan atas pandangan hidup bangsa. Menurut pandangan beliau bangsa yang tidak memiliki kepercayaan kepada diri sendiri tidak akan mampu berdiri dengan kokoh, sehingga menjadikan kepercayaan sebagai pondasi yang krusial dalam membangun negara yang stabil,

berdaya, dan berwibawa di mata dunia.

Seiring dengan pandangan Soekarno, dalam *The Legal Architecture of Nation Building*, (Norchi, t.t.), seorang pakar hukum internasional, menyoroti pentingnya memiliki gambaran ideal tentang suatu bangsa, termasuk karakter, falsafah, dan pandangan kolektif. Mitos ini berfungsi sebagai standar nilai dan moral komunitas yang tidak boleh diabaikan dalam proses pembangunan negara. Pandangan ini selaras dengan pemikiran Soekarno dan Gardner yang meyakini bahwa sebuah bangsa tidak dapat mencapai kebesaran dan kehebatan tanpa memiliki falsafah, tujuan, dan cita-cita ideal yang dipercayai Bersama (Yaquut Cholil Qoumas, 2021). Kepercayaan yang mengandung dimensi moral inilah yang menjadi landasan kokoh bagi terbentuknya peradaban besar suatu bangsa dan menjaga kerapian serta kesatuan langkah dalam perjalanannya menuju kemajuan.

Dalam konteks pembangunan bangsa yang stabil dan berkelanjutan, internalisasi nilai-nilai Pancasila

sebagai fondasi ideologi negara menjadi faktor krusial yang perlu ditekankan. Pancasila, dengan kelima silanya yang mewakili Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan, bukan hanya sebagai doktrin formal, tetapi sebagai prinsip moral yang memandu setiap langkah bangsa Indonesia menuju kemajuan dan kesejahteraan bersama. Maka dari itu, pentingnya nilai Persatuan dalam Pancasila menjadi landasan untuk membangun kesadaran akan pentingnya bersatu demi kelangsungan negara. Dengan memperkuat nilai persatuan, masyarakat dapat diberdayakan untuk melihat keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai pemecah belah. Langkah ini secara efektif membantu mengatasi polarisasi identitas yang dapat mengancam stabilitas sosial. Dengan demikian, menginternalisasi nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh, khususnya nilai Persatuan, menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan bangsa yang beradab dan bermartabat. Implementasi nilai Persatuan dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi jalan untuk

membangun kesatuan di tengah perbedaan, menjadikan keragaman sebagai sumber kekuatan dalam membangun bangsa yang inklusif dan berdaya saing.

Dalam upaya memperkuat persatuan dan meredam politik identitas di Indonesia, nilai-nilai Pancasila memiliki peran yang sangat penting. Pancasila tidak hanya sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai panduan dalam menjalankan kehidupan berbangsa yang beradab dan bermartabat. Nilai-nilai Pancasila, seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan, memiliki potensi besar untuk menangkal politik identitas yang mengancam stabilitas nasional (Tiarylla dkk., 2023). Berikut adalah analisis nilai-nilai Pancasila yang dapat digunakan untuk meredam politik identitas:

1. Persatuan (*unity*):

- a. Nilai persatuan dalam Pancasila menjadi perekat utama dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Dalam konteks politik identitas yang memecah belah

masyarakat, nilai persatuan Pancasila dapat digunakan sebagai landasan untuk membangun kesadaran akan pentingnya bersatu demi keberlangsungan negara.

- b. Dengan memperkuat nilai persatuan, masyarakat dapat diberdayakan untuk melihat keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai perpecahan. Hal ini akan membantu meredam polarisasi identitas yang dapat mengancam stabilitas sosial.

2. Kemanusiaan (*humanity*):

- a. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi setiap individu. Dalam konteks politik identitas yang sering

- kali melibatkan diskriminasi dan intoleransi, nilai kemanusiaan Pancasila dapat menjadi landasan untuk membangun sikap inklusif dan menghargai keberagaman.
- b. Dengan memperkuat nilai kemanusiaan, masyarakat dapat teredukasi tentang pentingnya menghormati hak-hak setiap individu tanpa memandang perbedaan identitas.
3. Keadilan (*justice*):
- a. Nilai keadilan dalam Pancasila menuntut perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks politik identitas yang rentan terhadap diskriminasi dan ketidakadilan, nilai dapat landasan untuk memastikan setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum dan pemerintah.
- b. Dengan memperkuat nilai keadilan, masyarakat dapat diberdayakan untuk menuntut transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang adil, sehingga meredam potensi ketidakadilan yang dapat memicu konflik identitas.
- Dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, masyarakat Indonesia dapat bersama-sama membangun kesadaran akan pentingnya persatuan, kemanusiaan, dan keadilan dalam menjaga stabilitas negara. Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, politik identitas yang meresahkan dapat diredam, dan persatuan serta keberagaman bangsa dapat diperkuat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, Pancasila menjadi hal sangat penting

dalam berperan menggabungkan elemen yang berbeda dari kehidupan Indonesia. Sebagai filosofi dasar, Pancasila telah membentuk identitas nasional yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Dalam konteks Sejarah, Pancasila memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk perilaku dan identitas nasional Indonesia, mendorong semangat persatuan dan keadilan (Karunia dkk., 2023). Pancasila telah berpengaruh besar dalam membentuk cara hidup dan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap identitas nasional Indonesia.

Dalam konteks nation-building, pentingnya memperkuat persatuan dan menangani konflik identitas menjadi aspek sentral dalam membangun identitas nasional Indonesia. Pengembangan kebudayaan dan kebahasaan telah menjadi poin penting dalam memperkuat identitas nasional, seperti yang ditunjukkan melalui kongres kebudayaan dan bahasa dalam sejarah Indonesia. Seiring dengan itu, persatuan bangsa dapat diperkuat melalui integrasi wilayah dan keterlibatan yang baik antara elit dan massa masyarakat. Contoh

konkret seperti penangkapan anggota kelompok separatis atau pemberontakan menggarisbawahi pentingnya menjaga kesatuan nasional. Di sisi lain, penanganan konflik identitas menuntut pendekatan bijaksana dengan mempertimbangkan pembentukan entitas baru atau menangani pemberontakan dengan memperhatikan identitas dan kepentingan masyarakat terkait. Kesadaran akan perpajakan juga menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan nasional yang kuat dan kemandirian bangsa. Teori hubungan internasional memberikan wawasan krusial dalam mengelola konflik identitas antar bangsa, dengan konsep identitas, persatuan, dan penanganan konflik identitas menjadi pondasi utama bagi sebuah negara yang berdaulat dan stabil. Indonesia telah mengalami berbagai upaya untuk mengembangkan identitas nasional, persatuan, dan penanganan konflik identitas. Maka dari itu, Berikut adalah beberapa contoh konteks upaya negara lain:

1. Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, Singapura, dan Malaysia: Di negara-negara

ini, terdapat dukungan luas terhadap pemerintahan yang kuat dan partai penguasa, serta adanya respek terhadap institusi negara. Selain itu, terdapat kesetiaan, disiplin, dan kewajiban yang diberikan oleh ajaran Konfusian.

2. Negara-Negara Islam: Islam sebagai sebuah kekuatan politik memiliki efek yang mendalam pada politik di Afrika Utara, Timur Tengah, dan beberapa bagian di Asia.
3. Negara Serikat atau Federal: Negara-negara ini menekankan komunitas dan kohesi sosial yang diwujudkan dalam peran sentral yang diberikan kepada keluarga.
4. Negara Kedaulatan Negara: Negara-negara ini menekankan teori kedaulatan negara, yang dapat berupa teori kedaulatan tuhan (theokrasi), kedaulatan rakyat (demokrasi), atau kedaulatan hukum (kasatria).
5. Negara Rezim Islam: Dalam beberapa kasus, rezim-rezim Islam menantang rezim-rezim

yang ada, yang sering mengartikulasikan kepentingan orang miskin perkotaan karena kekecewaan terhadap Marxisme-Leninisme pada tahun 1970-an.

6. Negara Kesatuan: Negara-negara yang memiliki konstitusi yang mengatur dasar negara sebagai pondasi berdirinya sebuah negara.
7. Negara Demokrasi: Negara-negara yang memiliki sistem pemerintahan yang berwujud demokrasi, yang mengatur dasar negara sebagai pondasi berdirinya sebuah negara.

Selain itu, negara lain juga mengalami berbagai upaya dalam membangun kohesi bangsa. Misalnya, negara-negara yang memiliki konstitusi yang mengatur dasar negara sebagai pondasi berdirinya sebuah negara, seperti negara kesatuan, dapat membantu membangun kohesi bangsa yang kokoh. Sistem pemerintahan demokrasi juga dapat menjadi faktor yang membantu membangun kohesi bangsa, seperti di negara-negara demokrasi.

Penguatan nilai-nilai Pancasila terhadap akuntabilitas publik dan kepercayaan masyarakat di Indonesia sangat vital, terutama di tengah kompleksitas politik identitas yang menimbulkan ancaman terhadap stabilitas nasional. Pancasila, sebagai ideologi dan falsafah dasar negara, menjadi landasan utama untuk mengarahkan Indonesia sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Kelima sila Pancasila - Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan - menjadi perekat dan panduan dalam menjalankan kehidupan bernegara yang beradab dan bermartabat. Pancasila juga menjadi acuan untuk menjalankan roda pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas, serta mengedepankan pelayanan kepada rakyat. Namun, merealisasikan nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya dengan retorika. Untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana tertera dalam Pembukaan UUD 1945, diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum. Dalam konteks politik identitas yang semakin kompleks, politik identitas

dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk nasionalisme radikal, etnis, religius, atau berbasis suku. Tantangan ini menggambarkan kompleksitas dalam memelihara stabilitas sosial dan politik di Indonesia yang kaya akan keberagaman. Politik identitas bukan hanya memengaruhi fragmentasi masyarakat berdasarkan identitas yang sempit, tetapi juga mengancam integritas sosial secara lebih luas. Kebijakan pemerintah yang terpengaruh oleh pertimbangan identitas daripada kepentingan nasional dapat mengganggu akuntabilitas publik. Untuk memperkuat akuntabilitas publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan transparansi dalam pembagian dan pengelolaan anggaran, pengembangan sistem informasi publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pemerintah, serta penegakan hukum yang efektif dan efisien.

### **C. Strategi Memperkuat Akuntabilitas Publik Dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik**

Pancasila, sebagai ideologi dan falsafah dasar negara, menjadi fondasi utama yang mengarahkan Indonesia sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Kelima sila Pancasila - Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan - menjadi perekat dan panduan dalam menjalankan kehidupan bernegara yang beradab dan bermartabat. Sebagai negara yang kaya akan keragaman, Indonesia membutuhkan sebuah ideologi yang kuat sebagai pemersatu yang menawarkan landasan filosofis untuk membangun karakter dan jati diri bangsa. Dalam konteks keberagaman yang melimpah, Pancasila berfungsi sebagai panduan yang kokoh dalam membentuk karakter nasional dan memperkuat identitas bangsa. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan moral yang membantu menjaga persatuan dan keadilan dalam kehidupan bernegara. Ideologi ini juga memberikan dasar filosofis yang diperlukan untuk membangun fondasi karakter bangsa yang beradab dan bermartabat. Tetapi, mewujudkan nilai-nilai Pancasila tidak cukup dengan sekadar wacana. Untuk mencapai cita-cita luhur bangsa

seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip itu sendiri seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum menjadi tuntutan agar setiap kebijakan pemerintah mampu memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan rakyat. Saat ini, Indonesia hadapi tantangan politiknya yang semakin kompleks, yang mengancam koherensi nasional dan memudarnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan tingginya polarisasi identitas yang tidak terkendali, dapat terjadi tindakan radikal dan sikap sektarian yang mengancam tidak hanya kelompok-kelompok tertentu tetapi juga kesatuan sosial secara keseluruhan (Corry & Reiner, 2021). Hal ini menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan stabilitas sosial dan politik di negara yang kaya akan keberagaman seperti Indonesia. Politik identitas tidak hanya berdampak pada fragmentasi masyarakat berdasarkan garis-garis identitas yang sempit, namun juga

mengancam integritas sosial secara lebih luas. Kebijakan pemerintah yang cenderung dipengaruhi oleh pertimbangan identitas daripada kepentingan nasional dapat mengganggu akuntabilitas publik dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berikut adalah hasil pengumpulan data mengenai aspek-aspek akuntabilitas publik yang perlu diperkuat di Indonesia:

1. Akuntabilitas publik: merupakan elemen krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Ini mencakup manajemen dan alokasi dana yang transparan, efektif, dan efisien. Dalam situasi politik yang semakin kompleks terkait identitas, akuntabilitas publik dapat mengganggu kesatuan nasional dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
2. Transparansi adalah fondasi utama dari tata kelola pemerintahan yang baik. Ini mencakup pengumpulan, penyediaan, dan pembagian informasi secara terbuka dan

jelas kepada masyarakat. Namun, dalam era politik yang dipenuhi dengan keragaman identitas, tingkat transparansi yang tepat perlu dipertimbangkan untuk menjaga koherensi nasional dan memelihara kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika transparansi diterapkan dengan bijak, dapat menjadi alat yang kuat untuk membangun integritas institusi dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan warganya.

3. Partisipasi masyarakat adalah elemen penting dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan yang demokratis dan inklusif. Hal ini mencakup melibatkan masyarakat dalam konsultasi dan pengaturan kebijakan. Meskipun penting untuk meningkatkan partisipasi warga negara, situasi politik yang kompleks dapat menimbulkan tantangan terhadap koherensi nasional. Oleh karena itu, perlu ditemukan keseimbangan

yang tepat antara partisipasi masyarakat yang efektif dan kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas sosial serta persatuan nasional.

4. Penegakan hukum yang efektif adalah pilar lain dari tata kelola pemerintahan yang kuat. Ini melibatkan penerapan dan penegakan hukum secara adil dan efisien. Namun, di tengah dinamika politik yang dipengaruhi oleh identitas yang kompleks, penegakan hukum dapat menantang koherensi nasional jika tidak dijalankan dengan baik. Penting untuk menerapkan sistem hukum yang berlaku untuk semua warga negara tanpa kecuali, serta memastikan independensi dan integritas lembaga penegak hukum untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pemerintah.

Untuk memperkuat akuntabilitas publik di Indonesia, diperlukan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti

akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum. Hal ini bertujuan untuk memperkuat semangat persatuan dan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi dan dinamika politik identitas yang semakin kompleks. Penerapan prinsip-prinsip ini akan membantu memelihara keberagaman bangsa serta memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.

Keterkaitan antara akuntabilitas publik dan politik identitas sangatlah relevan, terutama dalam konteks dinamika politik yang semakin kompleks. Politik identitas yang berkembang pesat dapat menimbulkan ancaman terhadap koherensi nasional dan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan meningkatnya polarisasi identitas yang tidak terkendali, risiko tindakan radikal dan sikap sektarian juga semakin mengancam tidak hanya kelompok-kelompok spesifik tetapi juga kesatuan sosial secara keseluruhan. Pemahaman identitas yang ekstrem dapat mengaburkan visi bersama dan merusak fondasi solidaritas sosial.

Kebijakan publik yang dipengaruhi oleh pertimbangan identitas daripada kepentingan nasional dapat mengganggu akuntabilitas pemerintah dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara (Permatasari, 2021). Oleh karena itu, penting untuk menegaskan urgensi menjadikan Pancasila bukan hanya sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai panduan yang kokoh dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, efektif, dan penuh dedikasi dalam melayani seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, sebagai landasan negara, tidak hanya mengandung prinsip-prinsip filosofis, tetapi juga memuat nilai-nilai yang mendorong kesatuan dan persatuan di tengah keberagaman. Dalam konteks ini, tata kelola pemerintahan yang baik harus mencerminkan semangat kebersamaan dan keadilan, dengan kepentingan negara senantiasa diutamakan di atas segala pertimbangan identitas sempit. Hanya dengan pendekatan ini, Indonesia dapat mengatasi tantangan politik identitas yang kompleks, memperkuat akuntabilitas publik, dan mengembangkan kepercayaan yang

kuat di antara masyarakat terhadap pemerintahannya. Sedangkan untuk memperkuat akuntabilitas public dan tata Kelola pemerintahan yang baik di Tengah kompleksitas isu politik identitas, perlunya beberapa strategi sebagai berikut yang dapat diimplementasikan:

1. Memperkuat pengertian dan penerapan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah dasar negara. Hal ini melibatkan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang makna dan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan bangsa. Dengan pemahaman yang kuat terhadap Pancasila, diharapkan masyarakat dapat memahami arti penting persatuan, keadilan, dan keragaman dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum. Langkah-langkah konkret harus dilakukan untuk

meningkatkan integritas dan kinerja pemerintah, termasuk memastikan proses pengambilan keputusan yang terbuka, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dan menegakkan hukum dengan adil dan efisien.

3. Memperkuat pemahaman masyarakat tentang Pancasila dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui pendekatan komunikasi dan edukasi yang menyeluruh. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila serta memahami pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mencapai kemajuan bersama.
4. Memperkuat pengawasan dan evaluasi keberhasilan pemerintahan secara berkala. Mekanisme pengawasan yang efektif perlu diperkuat untuk memastikan akuntabilitas dan kinerja pemerintah yang baik. Evaluasi terhadap kebijakan

dan program pemerintah perlu dilakukan secara objektif dan transparan guna menjamin efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks dinamika politik identitas yang semakin kompleks, penting untuk mengamati bagaimana kebijakan pemerintah yang cenderung dipengaruhi oleh pertimbangan identitas dapat berdampak pada akuntabilitas publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini mendorong urgensi untuk menjadikan Pancasila tidak sekadar sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai pedoman yang mengemban nilai integritas, kebersihan, efektivitas, serta pelayanan yang berkeadilan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Teori good governance, yang mencakup prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum, menjadi landasan penting untuk memperkuat akuntabilitas publik. Dalam implementasinya, good governance juga dapat berperan dalam meningkatkan koherensi nasional dan memperkuat

kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama di tengah kompleksitas politik identitas yang mempengaruhi masyarakat. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi good governance secara komprehensif, termasuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila, pemerintah dapat membangun fondasi yang kuat untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Diharapkan upaya ini juga akan membantu Indonesia menghadapi tantangan politik identitas dengan lebih efektif dan berintegritas, mengarah pada peningkatan akuntabilitas publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan negara.

## **KESIMPULAN**

Pada masa yang penuh gejolak ini, di mana politik identitas mengancam untuk membelah jalinan keberagaman bangsa Indonesia, penelitian ini menegaskan kembali signifikansi Pancasila sebagai perekat kebhinekaan. Nilai-nilai luhur Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan yang terkandung dalam Pancasila bukan sekadar simbol kosong, melainkan harus ditegakkan sebagai pilar kokoh

bagi akuntabilitas publik dan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa politik identitas berpotensi memecah belah masyarakat, menggoyahkan stabilitas sosial, serta mengikis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Menghadapi tantangan ini, upaya sistematis dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk mereaktualisasikan semangat Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah strategis seperti memperkuat transparansi, mendorong partisipasi masyarakat, serta menegakkan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi. Pada intinya, Pancasila harus dijadikan sebagai landasan moral dan panduan dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia akan mampu merajut kebhinekaannya dalam satu ikatan yang kokoh, menapaki kemajuan dengan bermartabat, sekaligus menghadapi

tantangan global dengan semangat persatuan yang membara.

Inilah saatnya untuk bangkit dan merevitalisasi pemahaman akan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Hanya dengan berpegang teguh pada falsafah luhur inilah, Indonesia akan mampu mengejawantahkan cita-cita persatuan dan mengukuhkan diri sebagai negara yang berdaulat, maju, dan disegani di panggung dunia.

## DAF

## TAR PUSTAKA

- . Z. (2023). Communication of Political Identity & Indonesian Presidential Candidacy in the 2024 Election. *The International Journal of Humanities & Social Studies*. <https://doi.org/10.24940/theijhss/2023/v11/i1/HS2301-014>
- Afrimadona. (2021). Revisiting Political Polarisation in Indonesia: A Case Study of Jakarta's Electorate. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(2), 315–339. <https://doi.org/10.1177/18681034211007490>
- Amy Chua. (2018, Maret 1). How America's identity politics went from inclusion to division. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/society/2018/mar/01/how-americas-identity-politics-went-from-inclusion-to-division>
- Aprea, J. (2021, Februari 17). *A New Civil Rights Movement, a New Journal*. JSTOR Daily. <https://daily.jstor.org/a-new-civil-rights-movement-a-new-journal/>
- BBC News Indonesia. (2024, Januari 5). *Rangkuman debat capres: Anies-Prabowo saling serang soal etika hingga pengetahuan soal pertahanan, tiga capres angkat isu Palestina*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c51z5g1kv61o>
- Bui, P. (2024). Defining American National Identity: An Exploration into Measurement and Its Outcomes. *Nationalities Papers*, 52(1), 3–21. <https://doi.org/10.1017/nps.2021.79>

- Corry, O., & Reiner, D. (2021). Protests and Policies: How Radical Social Movement Activists Engage with Climate Policy Dilemmas. *Sociology*, 55(1), 197–217. <https://doi.org/10.1177/0038038520943107>
- Desiree, T. (2022). *Identity Politics in Indonesia: Implications on the 2024 Indonesian General Election. The Convergence*. <https://www.nuspatc.org/post/identity-politics-in-indonesia-implications-on-the-2024-indonesian-general-election>
- El Shidqi, R. F., & Andriyani, L. (2022). POLITIK IDENTITAS: RADIKALISME, TERORISME DAN DISKRIMINASI RASIAL. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.24853/independen.3.1.47-52>
- Febriansyah, B. A., Manando, I., & Kusuma, A. W. (2024). Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama. *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 57–68. <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2769>
- Karunia, A. D. I., Agustina, K. F. P., & Nisa', D. R. (2023). *Nilai-Nilai Pancasila sebagai Identitas Nasional*.
- Mas'udi, W. (2023). Identity Politics in the Practices of Current Indonesian Democracy: A Trigger of Declining? Dalam N. N. Illiyyun, E. Supriadi, R. M. Safitri, & M. Masrohatun (Ed.), *Proceedings of the 2nd International Conference on Democracy and Social Transformation (ICON-DEMOST 2023)* (Vol. 793, hlm. 230–233). Atlantis Press SARL. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-174-6\\_40](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-174-6_40)
- Noersyaheri, F. A., Mayriskha, K. R., Riszeki, S. M., & Fitriyono, R. A. (2022). *PANCASILA DAN TANTANGAN MASA KINI*. 9.

- Norchi, C. H. (t.t.). THE LEGAL ARCHITECTURE OF NATION- BUILDING: AN INTRODUCTION. *MAINE LAW REVIEW*, 60.
- Nurhidayat, I. (2023). *PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA*. 1.
- Permatasari, C. H. (2021, Maret 3). *Politik Identitas, Tantangan Demokrasi Indonesia*. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1006-politik-identitas-tantangan-demokrasi-indonesia>
- Putri, F. I. S., & Adam, K. M. T. (2022). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Karakter Bangsa Indonesia*. 1(2).
- Ridho, M. R., & Putra, R. F. L. (2024). *PROBLEMATIKA POLITIK IDENTITAS DI NEGARA DEMOKRASI*. 6(2).
- Tiarylla, D. S., Azhima, L. U., & Saputri, Y. A. (2023). *Pancasila sebagai Dasar Negara di Indonesia*.
- Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. (2021). *PENGARUH POLITIK IDENTITAS TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA*.
- Yani, D., & Dewi, D. A. (2021). *Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Tantangan di Arus Globalisasi*. 5.
- Yaqut Cholil Qoumas. (2021). *Pancasila Mengharmonikan Keberagaman Indonesia*. <https://kemenag.go.id>. <https://kemenag.go.id/opini/pancasila-mengharmonikan-keberagaman-indonesia-1dl3vb>